

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN STNK/SIM AKIBAT KETERLAMBATAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR” ini ditulis oleh Gea Farisca, NIM 1510112013, pembimbing Ahmad Suryono, S.H., M.H.

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh jumlah pengguna kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun. Semakin meningkat jumlah pengguna kendaraan bermotor, maka akan meningkat pula jumlah Wajib Pajak yang harus membayar pajak. Namun tidak sedikit Wajib pajak yang kemudian lalai dalam melakukan pembayaran pajak tersebut. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor, di maksudkan agar Wajib Pajak tertib dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi tingkat kesadaran masyarakat masih relatif rendah dan masih bersifat pasif dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini dapat berkaitan dengan sanksi tilang yang diberikan polisi lalu lintas ketika mendapatkan pengguna kendaraan bermotor tidak tertib membayar pajak.

Berdasarkan perspektif hukum, STNK dilakukan pengesahan tiap tahunnya, pada saat pengesahan pemilik harus membayar pajak dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), dengan matinya pajak STNK belum disahkan oleh petugas yang berwenang, oleh sebab itu menyebabkan STNK tidak sah. Jadi pembayaran pajak, SWDKLLJ dan pengesahan merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menjamin legitimasi atau keabsahan STNK. Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor juga merupakan sumber pendapatan daerah yang berpengaruh pada pembangunan daerah serta penerapan sanksi tilang yang diambil alih oleh kepolisian lalu lintas menimbulkan beberapa prespektif.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : “Bagaimana kajian yuridis terhadap penyitaan SIM/STNK akibat keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor?” Dalam penelitian ini menggunakan 2 metode pendekatan, yaitu : 1. Pendekatan Perundang-undangan, yaitu Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan, dan 2. Pendekatan Konseptual, yaitu merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep – konsep hukum yang melatar belakanginya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan tinjauan yuridis tentang penyitaan surat izin mengemudi (SIM) dan/ atau surat tanda nomor kendaraan (STNK) terhadap pelanggar aturan lalu lintas dalam hal ini tidak membayar pajak, Pihak Kepolisian sama sekali tidak berwenang untuk melakukan penyitaan yang telat melakukan pembayaran pajak oleh karena sepanjang benda yang akan dilakukan penyitaan tidak memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 39 KUHAP.

Kata Kunci : Penyitaan STNK/SIM, Keterlambatan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

## **ABSTRACT**

*Thesis with the title "JURISDICAL STUDY ON STNK/SIM CONTRIBUTION confiscation DUE TO DELAY PAYING MOTOR VEHICLE TAX" was written by Gea Farisca, NIM 1510112013, supervisor Ahmad Suryono, S.H., M.H.*

*The research in this thesis is motivated by the number of motorized vehicle users which continues to increase every year. As the number of motorized vehicle users increases, the number of taxpayers who must pay taxes will also increase. However, not a few taxpayers are then negligent in paying the tax. With the existence of laws and regulations governing motor vehicle tax, it is intended that taxpayers be orderly in paying motor vehicle taxes. However, the level of public awareness is still relatively low and is still passive in carrying out the obligation to pay taxes. This can be related to the fines imposed by the traffic police when they get motorized vehicle users who do not pay taxes in an orderly manner.*

*Based on a legal perspective, STNK is ratified every year, at the time of ratification the owner must pay taxes and mandatory contributions to road traffic accident funds (SWDKLLJ), with the death of the STNK tax not yet ratified by the authorized officer, therefore causing the STNK to be invalid. So tax payments, SWDKLLJ and ratification are a unified system that cannot be separated in order to ensure the legitimacy or validity of the STNK. This should be a concern of the government considering that the motor vehicle tax is also a source of regional income that affects regional development and the imposition of ticket sanctions that are taken over by the traffic police raises several perspectives.*

*The formulation of the problem in writing this thesis is: "How is the juridical study of the confiscation of SIM / STNK due to delays in paying motor vehicle taxes?" In this study, 2 approach methods are used, namely: 1. Legislative Approach, namely the approach is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issues raised, and 2. Conceptual approach, which is a type of approach in legal research. which provides an analytical point of view of problem solving in legal research seen from the aspects of the legal concepts behind it.*

*The results of this study indicate that based on a juridical review regarding the confiscation of a driving license (SIM) and/or vehicle registration certificate (STNK) against traffic rules violators in this case not paying taxes, the Police are not at all authorized to confiscate late offenders. payment of tax because as long as the object to be confiscated does not meet the elements as determined based on Article 39 of the Criminal Procedure Code.*

*Keywords: Confiscation of STNK/SIM, Late Payment of Motor Vehicle Tax.*